

SKRIPSI

**PERAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
DALAM UPAYA PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA IJIN
DI PERAIRAN LAUT INDONESIA**



OLEH:

OCTAVIANUS EKA MARANATHA

NPM: 15300028

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI
PERAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
DALAM UPAYA PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA IJIN
DI PERAIRAN LAUT INDONESIA



OLEH:
OCTAVIANUS EKA MARANATHA
NPM: 15300028

SURABAYA, 24 JULI 2019

MENGESAHKAN,
DEKAN

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING UTAMA

Atet Sumanto, S.H., M.H

PEMBIMBING PENDAMPING

Bambang S.I, S.H, M.Hum., M.Tr.Hanla

PERAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT
DALAM UPAYA PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA IJIN
DI PERAIRAN LAUT INDONESIA

DIPERSIAPKAN DAN DI SUSUN

OLEH:

OCTAVIANUS EKA MARANATHA
NPM: 15300028

TELAH DIPERTAHANKAN
DIDEPAN DEWAN PENGUJI
PADA TANGGAL 17 JULI 2019
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Ahmad Basuki, SH., MH

(KETUA)



2. Atet Sumanto, SH., MH

(ANGGOTA)



3. Bambang S.I, SH, M.Hum., M.Tr.Hanla (ANGGOTA)



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA IJIN DI PERAIRAN LAUT INDONESIA”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan Hormat dan Kesungguhan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL (KL) Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Panglima Koarmada II Laksda TNI Mintoro Yulianto, S.Sos, M.Si. yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian skripsi di koarmada II Surabaya.
3. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, SH., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Bapak Dr. Dwi Tatak Subagiyo, SH., M.Hum. Ketua Program Studi sarjana hukum S1 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

5. Bapak Bambang S.I, SH, M.Hum., M.Tr.Hanla dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan tenaga serta pikiran dalam memberikan petunjuk pengarah dan bimbingan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Atet Sumanto SH, MH. Dosen Wali dan juga Dosen Pembimbing yang selalu memberikan masukan, arahan selama perkuliahan dan dalam menyusun skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Ksusuma Surabaya yang telah membimbing dan memberikan bekal ilmu yang sangat berguna bagi penulis selama perkuliahan.
8. Kedua Orang Tua dan adikku tercinta yang telah memberikan dukungan, doa, kasih sayang, motivasi dan seluruh bantuan yang diberikan kepada penulis.
9. Kepala Sub Dinas Hukum Laut dan Humaniter Koarmada II Letkol Laut (KH) Eko Priyatno dan Kasi Kumla Diskum Koarnada II Mayor Laut (KH) Mohamad Najiyulloh S.H. yang telah memberi informasi seputar penegakan hukum dan landasan hukum penyidik TNI AL.
10. Pabandia Kumla Koarmada II Mayor Laut (KH) Dwi Susilo, yang memberikan informasi mengenai prosedur penegakan hukum oleh TNI AL di laut.
11. Serma Kom Agus Musonif, S.Pd. Staf intelijen Koarmada II yang telah membantu pembuatan surat security clearence (SC) agar bisa melaksanakan penelitian skripsi.

12. Teman-teman Resimen Mahasiswa Mahasurya Satuan 823 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan temanku tercinta Ayu, Arsa, Daniel, Suryo, Andi yang selalu mendukung dan menyemangati saya dalam penyusunan skripsi.

13. Pihak-pihak yang tidak disebutkan namanya di dalam kesempatan ini, terimakasih atas segala bantuannya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Terakhir penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis juga.

Sekian dan Terimakasih.

Hormat kami,

Octavianus Eka Maranatha

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Octavianus Eka Maranatha

NPM :15300028

Alamat : Kedurus IA/25, Surabaya

No.Telp. (HP) : 081231830415

Menyatakan bahwa rancangan penelitian (proposal penelitian) yang berjudul “PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA IJIN DI PERAIRAN LAUT INDONESIA” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiatisme maupun autoplagiatisme saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 24 juli 2019

Yang Menyatakan,

A green and yellow postage stamp with the text "METERAI TEMPEL" and "6000 RUPIAH". It features the Garuda Pancasila emblem and a handwritten signature in black ink.

OCTAVIANUS EKA .M

NPM: 15300028

ABSTRACT

*The research entitled *The role by the Indonesian National Armed Forces Navy in an effort to eradicate fishing without permission in Indonesian waters, aimed first to determine the role of the Navy in law enforcement of fishing without permission in Indonesian marine waters. The second is to find out how criminal liability for perpetrators of fishing crimes without permission in Indonesia.**

In this writing using normative legal research methods, namely a process to find a rule of law, legal principles, as well as legal doctrines in order to answer the legal issues faced, thus this research legal material used is legal material related to library literature marine and fisheries law and this research was also supported by an interview method to one of the Indonesian Navy's investigators to become one of the speakers.

Based on the results of the study it can be concluded that with the existence of Law No.32 of 2014 and Law No. 45 of 2009 concerning Amendment to Law No. 31 of 2004 concerning Fisheries is expected to be better in providing legal clarity for institutions that have authority in the sea area, especially the Navy as the main component of national defense in the territorial waters obliged to safeguard state sovereignty and territorial integrity Indonesia, maintains security stability in the territorial waters, protects natural resources in the territorial waters from various forms of security disturbances and violations of laws in Indonesia's national waters, especially in the discussion in this study regarding Indonesian marine fisheries resources in accordance with the provisions in the law enforcement process in the waters Indonesian sea.

Keywords: *Investigators, fishing without permission, ships*

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam upaya pemberantasan tindak pidana penangkapan ikan tanpa ijin di perairan laut Indonesia bertujuan pertama untuk mengetahui peran TNI Angkatan Laut dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana penangkapan ikan tanpa ijin di wilayah perairan laut Indonesia. Kedua untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan tanpa ijin di Indonesia.

Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, dengan demikian penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum kepustakaan yang berkaitan dengan hukum kelautan dan perikanan dan penelitian ini juga didukung dengan metode wawancara kepada salah satu penyidik Tentara Indonesia Angkatan Laut untuk menjadi salah satu narasumber.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Undang-undang No.32 Tahun 2014 dan Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan diharapkan akan lebih baik dalam memberikan kejelasan hukum bagi institusi yang mempunyai wewenang dalam wilayah laut khususnya TNI Angkatan Laut sebagai komponen utama pertahanan negara di wilayah perairan berkewajiban untuk menjaga kedaulatan negara dan integritas wilayah laut Indonesia, mempertahankan stabilitas keamanan di wilayah perairan, melindungi sumber daya alam di wilayah perairan dari berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah perairan nasional Indonesia khususnya dalam pembahasan di penelitian ini mengenai sumber daya perikanan laut Indonesia dengan sesuai prosedur ketentuan yang ada dalam proses penegakan hukum di perairan laut Indonesia.

Kata kunci: Penyidik, penangkapan ikan tanpa ijin, kapal

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN	
PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN	
PERSETUJUAN.....	iii
KATA	
PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
ABSTRACT.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Metode Penelitian.....	23
G. Pertanggungjawaban Sistematis.....	25
BAB II PERANAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT DI BIDANG TINDAK PIDANA TERTENTU DI LAUT YANG MENCAKUP TENTANG PENANGKAPAN IKAN TANPA IJIN	
A. Landasan Hukum TNI Angkatan Laut Dalam Menangani Tindak Pidana Tertentu Dilaut Tentang Penangkapan Ikan	

	Tanpa Ijin.....	27
	B. Penanganan Tindak Pidana Tertentu di Laut oleh Angkatan Laut.....	32
	C. Dokumen Kapal Penangkap Ikan atau Pengangkut Ikan.....	39
	D. Modus Operandi.....	41
BAB III	PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK TNI AL DILAUT TERHADAP TINDAK PIDANA TERTENTU PENANGKAPAN IKAN TANPA IJIN DI PERAIRAN LAUT INDONESIA	
	A. Prosedur Pelaksanaan Penindakan Kapal.....	42
	B. Penerimaan dan Penyerahan Perkara Dari atau Diluar Instansi TNI AL.....	61
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	64
	B. Saran.....	67
	DAFTAR BACAAN	
	DAFTAR SINGKATAN	
	LAMPIRAN	

